



**REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**TANGGAPAN PEMERINTAH**

**ATAS**

**PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI**

**TERHADAP**

**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN**

**POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2024**

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Jakarta, 30 Mei 2023**

**Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,  
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.**

**Yang kami hormati, Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024. Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPR RI atas berbagai masukan dan pandangan serta persetujuan dari seluruh Fraksi untuk melanjutkan pembahasan Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 sebagai acuan dalam Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun 2024.

Kami menyimak dengan sungguh-sungguh berbagai pandangan Fraksi DPR RI atas KEM-PPKF Tahun 2024 yang bersepakat bahwa tantangan ke depan, yang berasal dari eksternal semakin berat, khususnya terkait meningkatnya fragmentasi geopolitik dan berbagai implikasinya.

Mempertimbangkan hal tersebut maka penguatan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga mengingat peran krusial APBN sebagai instrumen peredam gejolak ketidakpastian. Di sisi lain, APBN terus digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai agenda pembangunan nasional. Kondisi kesehatan dan kesinambungan fiskal juga perlu terus diperkuat guna menghasilkan kebijakan fiskal yang kredibel dan mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro.

**Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,**

Perkenankan kami memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024.

Sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, prospek pertumbuhan ekonomi domestik dipengaruhi oleh dinamika dan prospek ekonomi global. Prospek pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 diperkirakan membaik sejalan dengan moderasi harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami akselerasi dari sebelumnya 2,8% di tahun 2023 menjadi 3,0% di tahun 2024. Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga turut diperkirakan meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi 3,5% tahun 2024. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang lebih baik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang daya saing produk ekspor Indonesia.

Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat di tahun 2024 sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak juga akan turut mendorong aktivitas perekonomian. Investasi juga diharapkan dapat meningkat, khususnya terkait sektor-sektor berbasis hilirisasi, baik mineral dan produk-produk pertanian. Pembangunan smelter yang terus meningkat akan mendorong belanja modal korporasi pada sektor-sektor terkait. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia sehingga mampu mendorong daya tarik investasi yang lebih besar.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,7% dapat dicapai di tahun 2024.

Pemerintah juga sepakat dengan pandangan berbagai fraksi tentang pentingnya untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah gejolak global yang terus terjadi. Meningkatnya tensi geopolitik menjadi salah satu sumber ketidakpastian ekonomi global saat ini. Selain itu, kondisi likuiditas global juga masih ketat tercermin dari tingkat suku bunga acuan global yang diperkirakan bertahan di level yang tinggi untuk jangka waktu lama (*higher for longer*). Kita juga perlu terus mengantisipasi berbagai tantangan lain dalam jangka menengah dan panjang seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat, serta ancaman pandemi di masa mendatang.

### **Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,**

Menanggapi pandangan **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS** tentang indikator dan Sasaran Pembangunan, terutama terkait dengan target kemiskinan dan pengangguran di tahun 2024, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat di tahun 2020 akibat pandemi, dalam dua tahun terus dapat diturunkan. Pemulihan ekonomi yang terus menguat juga terbukti mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan.

Upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong sektor-sektor dengan efek pengganda besar dan menciptakan lapangan kerja yang luas. Peningkatan infrastruktur dasar di berbagai wilayah juga dilakukan melalui program padat karya, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi masyarakat.

Dalam jangka pendek, kebijakan pengentasan kemiskinan diarahkan utamanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14% di tahun 2024. Upaya penghapusan

kemiskinan ekstrem ditempuh melalui upaya-upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Sementara untuk penurunan prevalensi *stunting* difokuskan melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas, yang meliputi tujuh provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah anak *stunting* terbesar.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Dengan memperhatikan dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian kedepan serta tantangan dan agenda pembangunan kedepan maka, arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk **mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.**

**Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi tersebut perlu penguatan reformasi fiskal secara holistik** melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan *spending better*, serta mendorong pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan berkelanjutan. Hal ini terefleksi pada optimalisasi pendapatan negara mencapai 11,81% sampai dengan 12,38% PDB, belanja negara di kisaran 13,97% sampai dengan 15,01% PDB, keseimbangan primer menuju positif, defisit dikendalikan di kisaran 2,16% sampai dengan 2,64% PDB serta rasio utang dijaga dalam batas *manageable* di kisaran 38,07% sampai dengan 38,97% PDB.

### **Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,**

Pemerintah mengapresiasi pandangan dari **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP** terkait pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat.

Dapat kami sampaikan bahwa arah kebijakan optimalisasi perpajakan tahun 2024 dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui implementasi sistem inti perpajakan (*core-tax system*) yang menjadi motor perubahan berbagai aspek perpajakan dan diiringi dengan penguatan sisi administrasi, antara lain penguatan proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, dari sisi kebijakan, Pemerintah menjaga agar sistem perpajakan lebih adil, sehat dan berkelanjutan serta berpihak kepada masyarakat dan UMKM. Pemerintah juga secara konsisten melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak untuk percepatan transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.

Upaya peningkatan PNBPN juga akan terus diupayakan melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA), optimalisasi pengelolaan aset negara, serta inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas layanan publik.

### **Para Hadirin, Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami muliakan,**

Menanggapi pandangan dari **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP** mengenai pentingnya peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menopang agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah sepakat dan menyampaikan penghargaan atas dukungan Anggota Dewan yang terhormat.

Untuk meningkatkan kualitas belanja di tahun 2024, Pemerintah konsisten melanjutkan penguatan *spending better* melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.

Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui:

1. peningkatan kualitas dan akses pendidikan (seperti PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, *link and match*),
2. penguatan kualitas dan akses kesehatan (efektivitas JKN, kemandirian farmasi, sistem kesehatan yang handal),
3. percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN).),
4. mendorong hilirisasi SDA, serta
5. mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Pada sisi lain, Pemerintah juga mendukung agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Sejalan dengan semangat penguatan *spending better*, Pemerintah secara konsisten **meningkatkan kualitas belanja daerah agar semakin sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antardaerah**. Harmonisasi dan sinergisitas kebijakan pusat dan daerah diharapkan akan mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja serta perbaikan kualitas layanan publik di daerah.

### **Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya, ijin kan kami untuk menyampaikan tanggapan atas pandangan **Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PAN** terkait dengan **kebijakan pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)**. Dukungan terhadap KBLBB ini merupakan upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, serta penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

Dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di AS, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100% mobil listrik di tahun 2035-2040. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi *supply* maupun *demand* untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Menanggapi pandangan **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP** terkait defisit dan pembiayaan anggaran, kiranya dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah mengapresiasi pandangan Anggota Dewan yang terhormat mengenai pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, *prudent*, dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan **kebijakan fiskal 2024 yang ekspansif, terarah dan terukur**, Pemerintah akan mengendalikan defisit di kisaran 2,16% hingga 2,64% PDB. Sejalan dengan hal tersebut, **pembiayaan utang tetap dikelola secara prudent, dan sustainable** sesuai *best practice* pengelolaan utang, dengan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko, menjaga rasio utang dalam batas aman di kisaran 38,07% hingga 38,97% PDB, menerbitkan utang secara terukur, serta melakukan pendalaman pasar agar *cost of fund* semakin efisien. Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan inovatif dan kreatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN, BLU, SMV, dan SWF untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan.

**Ibu, Bapak, para Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami muliakan,**

Demikianlah jawaban dan tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kerangka Ekonomi Makro



dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2024 dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2024. Tanggapan yang lebih lengkap terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR kami sampaikan secara tertulis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami sampaikan ini.

Sebagai penutup, atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap Anggota Dewan. Semoga Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2024 dapat berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq  
Wassalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.  
Om Shanti Shanti Shanti Om,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.**

**Jakarta, 30 Mei 2023**

**a.n. Pemerintah Republik Indonesia**

**Menteri Keuangan**

**ttd**

**Sri Mulyani Indrawati**